

# KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENERAPKAN BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) DI MALAYSIA (2013 – 2017)

Ngurah Gede Mahotama Jaya<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, A. A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: mngurahgede@yahoo.com<sup>1</sup>, rainypriadarsini@yahoo.com<sup>2</sup>, aabasuwinu@gmail.com<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research describes China's interest related to BRI initiative and its implementation in Malaysia. BRI has developed lanes which comprise into land and maritime lane. Southeast Asia is included in maritime pathway which has an important geographical, historical and strategic position towards China's national interest in seeking partnership with one of the countries in the region, namely Malaysia. However, the international situation surrounding Malaysia has also give an impression that Chinese policies utilize BRI's initiative to benefit its own interest rather than Malaysia interests including the South China Sea issue. Not to mention the Malacca Strait has created a dilemma towards China so that BRI is seen as a solution to overcome it. This research utilizes qualitative methods with secondary sources which then analyzed using the concept of National Interest and China's Grand Strategy, the data were collected from books, journals, websites, etc.*

**Keywords:** Belt and Road Initiative (BRI), National Interest, Grand Strategy

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1979, Tiongkok mereformasi ekonominya secara massif melalui kebijakan *Open-door Policy* yang diluncurkan oleh Presiden Deng Xiaoping. *Open door policy* memperkenalkan Tiongkok pada sistem ekonomi terbuka seperti reformasi pasar, industrialisasi, *foreign direct investment*, dan manufaktur berbasis impor ekspor. Kebijakan ini sukses menempatkan Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan sebagai salah satu *major power* yang mampu menguasai 15% GDP dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat ini diperkirakan mampu melampaui GDP Amerika Serikat tahun 2035 (Malcolm Scott & Cedric Sam, 2016).

Pada periode tahun 2013, Presiden Xi Jinping memperkenalkan *Belt and Road Initiative* (BRI) melalui pidato yang disampaikannya dalam kunjungan kenegaraan Tiongkok di Asia Tenggara dan Kazakhstan. Inisiatif BRI merepresentasikan visi Tiongkok dalam meningkatkan konektivitas melalui investasi untuk infrastruktur transnasional serta membangun Jalur Sutera Baru Abad Ke-21. Inisiatif BRI mempunyai dua jalur terpisah yaitu: *Silk Road Economic Belt* dan *21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*. Jalur darat (*Silk Road Economic Belt*) merupakan jalur yang membentang dari Tiongkok ke Barat menuju Asia Barat, Asia Tengah membentang hingga ke Russia dan Eropa. Jalur maritim (*21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*) merupakan jalur yang membentang dari pesisir Tiongkok ke

Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia hingga menuju daratan Eropa dengan berbagai infrastruktur pelabuhan sebagai tempat pemberhentian di Asia Tenggara, Afrika dan Asia Selatan. Peresmian BRI mampu memproyeksikan kekuatan global dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politik berdasarkan visi Impian Tiongkok (*China Dream*) (Cheang, 2017).

Tiongkok kemudian mengalihkan fokusnya pada Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan strategis dalam jalur inisiatif BRI. Pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN yang meningkat pesat sejak tahun 1967 serta posisi geografis yang berdekatan dengan Tiongkok menjadi faktor penentu (Wong, 2017). Malaysia adalah negara ASEAN pertama yang membuka hubungan bilateral dengan Tiongkok tahun 1974.

Tiongkok dan Malaysia telah memperkuat hubungan bilateral ketika Najib Razak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak tahun 2009 dan seiring berlakunya inisiatif BRI tahun 2013 (Cheng-Chwee, 2012). Alasan Tiongkok memilih Malaysia sebagai mitra strategis adalah adanya pendekatan non-konfrontasi oleh Malaysia terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan (Lean & Smyth, 2016). Adanya beberapa deklarasi politik seperti *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Seas* (DOC), perjanjian non-agresi ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC)

yang bermanfaat untuk mencegah kontestasi regional yang dapat mencederai hubungan Tiongkok-Malaysia (Cheng-Chwee, 2012). Faktor penguat lainnya adalah Etnis Tionghoa mencakup 24 persen dari jumlah total penduduk Malaysia.

Fokus implementasi BRI terletak pada Investasi pembangunan infrastruktur dan komoditas ekspor impor. Beberapa jalur rel yang diinvestasikan Tiongkok di Malaysia adalah *East Coast Rail Link* (ECRL) senilai US\$13 miliar dan proyek *Kuala Lumpur – Singapore High Speed Rail* senilai US\$ 16 miliar (Loh, 2018). Selain itu, Tiongkok juga memiliki suatu dilema yang dinamakan "*The Malacca Strait Dilemma*". Dilema ini berkaitan dengan kepentingan Tiongkok di Selat Malaka dan upayanya mengembangkan beberapa rute alternatif baru yang akan mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka. Hal ini menjadi ketertarikan untuk melihat kepentingan Tiongkok menerapkan Inisiatif BRI di Malaysia.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua tulisan ilmiah sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama merupakan tulisan dari S.D. Muni (2011) yang berjudul *India's 'Look East' Policy: The Strategic Dimension*. Tulisan S.D. Muni menjelaskan kepentingan India mendirikan kebijakan *Look East* untuk memperbaharui kepentingan ekonomi dan politik India pasca

Perang Dingin. Perdana Menteri Narasimha Rao secara resmi mengartikulasikan kebijakan *Look East* pada bulan September 1994. Kerangka kerja *Look East* negara – negara kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kawasan Asia Tenggara meliputi seluruh negara anggota ASEAN, sementara kawasan Asia Timur meliputi Jepang, Tiongkok dan Republik Korea Selatan.

Komoditas perdagangan India dengan ASEAN telah berkembang pesat sejak kebijakan *Look East* diberlakukan. Hal ini terlihat pada nilai perdagangan India dari US\$ 2.3 miliar tahun 1991 – 1992 menjadi US\$ 45.34 miliar tahun 2008 – 2009. Singapura tercatat sebagai mitra dagang terbesar India di ASEAN diikuti oleh Malaysia dan Indonesia. India juga menerima peningkatan investasi dari negara – negara kawasan Asia Timur dengan nilai total investasi sebesar US\$ 13.15 miliar pada bulan Agustus 2009. Pangsa investasi FDI (*Foreign Direct Investment*) Singapura ke India yang mencapai US\$ 8.66 miliar atau 8.72 persen nilai keseluruhan, diikuti oleh Jepang yang mencapai US\$ 3.30 miliar atau 3.44 persen dari total investasi yang masuk ke India.

S.D Muni juga memaparkan bahwa kepentingan keamanan menjadi agenda *Look East Policy* selanjutnya setelah kepentingan ekonomi. Hal ini terlihat pada upaya India memasok dan memperbaharui alutsista pertahanan yang masuk ke beberapa negara

ASEAN serta menawarkan program pelatihan untuk personel angkatan bersenjata mereka. Beberapa perjanjian penting telah diartikulasi dengan negara – negara seperti Vietnam, Laos, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Pemaparan diatas menunjukkan bahwa India mempunyai motivasi dalam mengembangkan kebijakan *Look East* yang didorong oleh kepentingan nasional diantaranya adalah: kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan. Oleh karena itu, kapabilitas India memainkan peran strategis di Asia Tenggara sesuai dengan penelitian yang membahas kepentingan Tiongkok menerapkan inisiatif BRI di Malaysia.

Tulisan kedua merupakan tulisan dari Bonnie S. Glaser (2014) yang berjudul *China's Grand Strategy in Asia*. Tulisan Bonnie S. Glaser memaparkan bahwa strategi besar Tiongkok diawali dengan upaya Presiden Xi Jinping mengartikulasikan kepentingan jangka panjang Tiongkok terhadap negara – negara di Asia Tenggara dan Asia Timur melalui Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada konferensi kerja utama yang diadakan 24 – 25 Oktober 2013 di Beijing. Tiongkok memandang bahwa perlu merangkul negara – negara tetangga sebagai mitra untuk hubungan yang lebih erat secara politik, ekonomi dan peluang kerja sama keamanan. Kebijakan inilah yang nantinya dinamakan *the neighbourhood policy*. Kebijakan tersebut dianalogikan sebagai upaya Tiongkok untuk

meyakinkan negara tetangga bahwa banyak hal menguntungkan yang didapatkan dari mengakomodasi kepentingan Tiongkok daripada menentanginya.

Adapun upaya Tiongkok mengincar beberapa kepentingan di Asia Timur yakni; memperkuat kendali atas wilayah maritim yang berdekatan dengan Tiongkok, mendorong integrasi ekonomi regional yang berpusat di Tiongkok, serta mempertahankan klaim kedaulatan Tiongkok. Hal ini terlihat dari langkah Tiongkok untuk mempertahankan klaim yurisdiksi dan teritorialnya di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan, mengunjungi negara – negara Asia Tenggara di tahun 2013 untuk mempromosikan jalur sutra maritim baru abad ke-21 yang menghubungkan Laut Pasifik dan India serta meningkatkan kerja sama finansial regional dengan menciptakan *Asian Infrastructure Bank* (AIIB).

Tiongkok dapat digolongkan sebagai kekuatan revisionis di Asia Timur dan meningkatkan dampak Tiongkok pada dinamika keamanan regional yang menimbulkan kekhawatiran mengenai perilaku dan tujuannya di Asia Pasifik. Hal ini ditunjukkan pada keprihatinan Jepang terhadap langkah Tiongkok mengubah *status quo* suatu wilayah dalam sengketa Pulau Senkaku/Diaoyu dengan Jepang bulan Desember 2008 dan klaim teritorial Tiongkok di beberapa wilayah Laut Tiongkok Selatan

sebagai tanggapan atas kehadiran Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dari dua tulisan diatas, penelitian ini mengambil dua konsep sebagai kerangka pemikiran yaitu: Kepentingan Nasional (*National Interest*), dan Strategi Besar (*Grand Strategy*). Kepentingan Nasional berfokus pada kepentingan ekonomi dan politik Tiongkok serta Strategi Besar berfokus pada strategi Tiongkok dibalik implementasi inisiatif BRI.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijabarkan dengan kalimat yang bersifat *deskriptif*. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu masalah yang dinamis, kompleks dan berkembang seiring berjalannya waktu sehingga tidak dapat diteliti melalui metode penelitian kuantitatif. Kualitatif deskriptif bersifat subyektif, umum, dan fleksibel seiring dengan berlangsungnya proses penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan kepentingan utama Tiongkok mengimplementasikan inisiatif BRI di Malaysia.

Unit analisis yang digunakan adalah negara dan oleh karena itu, Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari data tertulis seperti buku, jurnal, serta sumber literatur lainnya yang diperoleh secara online maupun

media cetak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yang merupakan teknik pengumpulan data mengenai permasalahan dengan mengulas literatur yang relevan. Data – data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dilengkapi dengan grafik, foto dan gambar.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 PERMASALAHAN ENERGI TIONGKOK dan PELAKSANAAN BRI

Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 1.4 miliar jiwa dan menempatkannya sebagai negara dengan populasi terpadat di dunia. Pada tahun 1979, Presiden Deng Xiaoping meluncurkan *open door policy* yang memperkenalkan Tiongkok pada sistem ekonomi terbuka seperti reformasi pasar, industrialisasi, *Foreign Direct Investment* (FDI) serta manufaktur berorientasi ekspor untuk mengatasi depresi ekonomi yang menggerogoti Tiongkok di masa pemerintahan Mao Zedong. Hal ini dikarenakan bahwa rencana lima tahun (*Great Leap Forward*) dipandang gagal dalam menaikkan ekonomi Tiongkok serta menjadi salah satu penyebab bencana kelaparan yang melanda Tiongkok tahun 1959 – 1962 karena banyaknya jumlah petani di Tiongkok yang terpaksa meninggalkan sektor agrikultur (Lin, 2003). Setelah kebijakan *Great Leap Forward* menuai

kegagalan, Mao Zedong menerapkan revolusi budaya tahun 1964. Revolusi budaya juga berdampak negatif terhadap politik dan ekonomi Tiongkok. Oleh karena itu, Deng Xiaoping mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut sebagai kebijakan pintu terbuka (*Open-door Policy*) tahun 1979 sebagai respon atas depresi ekonomi yang disebabkan oleh bencana revolusi budaya dan *the Great Leap Forward*.

Kebijakan *Open-door Policy* berfokus pada reformasi ekonomi serta meningkatkan perdagangan dan industri Tiongkok (Huan, 1986). Hal ini sukses memajukan ekonomi Tiongkok pada tahun 1980-an sehingga menjadikannya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia (Suryadinata, 2017). Adapun langkah strategis yang diterapkan Deng Xiaoping dalam *Open-door Policy* diantaranya: merancang zona ekonomi khusus untuk menstimulasi ekspor, menarik investasi luar negeri, melonggarkan kontrol atas valuta asing untuk perusahaan yang dikelola oleh investor luar negeri, dan menerapkan lisensi, tarif atau kuota (Wei, 1995).

Kebijakan *Open-door Policy* sukses meningkatkan GDP Tiongkok secara signifikan. Hal ini terlihat dari GDP Tiongkok yang tumbuh dari US\$ 216.5 miliar tahun 1978 menjadi US\$ 404.5 miliar tahun 1988, US\$ 9.6 triliun tahun 2013 hingga US\$ 12.2 triliun tahun 2017. Nilai GDP per kapita Tiongkok rata – rata

mempunyai jumlah sebesar 11% dalam periode tahun 1978 – 2013, dan nilai per kapita sebesar 9.6% dalam periode tahun 2010 – 2016 (William R. Gruver, 2016). Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok berimbas positif pada kemampuan raksasa Asia Timur tersebut menguasai 15% GDP dunia.

Tiongkok mengeluarkan beberapa kebijakan atau inisiatif selama empat dekade lebih hingga Xi Jinping mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok (Blackwill, 2016). Presiden Xi Jinping mengambil beberapa langkah proaktif untuk membawa perubahan pada kebijakan luar negeri Tiongkok. Visi pemerintahan Xi Jinping terpampang dalam slogan Impian Tiongkok (*China Dream*). Impian Tiongkok adalah untuk meningkatkan kekuatan lunaknya (*soft power*) di dunia, sementara pandangan realis menjelaskan bahwa Impian Tiongkok dimanfaatkan untuk mengartikulasikan visinya menjadi negara maju secara global (Ferdinand, 2016).

Presiden Xi Jinping memperkenalkan inisiatif BRI sebagai proyeksi wujud ambisi Tiongkok dalam mendirikan Jalur Sutra Baru Abad ke-21. Adapun alasan Xi Jinping memilih Indonesia dan Kazakhstan sebagai negara penyampaian inisiatif BRI yakni; Kazakhstan menjadi negara penghubung Tiongkok dengan negara Asia Tengah hingga Teluk Persia dimana negara – negara di kawasan tersebut mempunyai kekayaan sumber daya alam,

sementara letak geografis Indonesia yang strategis pada jalur perairan internasional mempunyai potensi besar untuk mendukung rencana pembangunan Jalur Maritim Tiongkok (Nufus, 2014). BRI memiliki dua jalur terpisah yaitu: jalur darat (*Silk Road Economic Belt*) dan jalur maritim (*21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*).

Implementasi BRI mampu mengakumulasi 65 negara yang merepresentasikan 62.3% dari populasi dunia, luas daratan seluas 38.5% dan 30% GDP dunia (World Bank Database, 2016). gabungan kekuatan ekonomi Tiongkok negara – negara BRI adalah setara atau bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan blok ekonomi seperti *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sejak mundurnya Amerika Serikat dari TPP ditambah populasi negara – negara *Belt and Road* merupakan yang terbesar dibanding blok ekonomi lainnya. Tiongkok juga memerlukan upaya timbal balik dari negara – negara yang tergabung dalam BRI untuk mendukung pendanaan jangka panjang terhadap kebutuhan infrastruktur (Chan, 2017).

Tiongkok merupakan salah satu negara yang bergantung pada kebutuhan energi seperti minyak yang menjadikannya sebagai negara pengguna sumber energi terbesar kedua di dunia. Strategi minyak Tiongkok pada abad ke-21 adalah untuk mendiversifikasi impor minyak, meningkatkan efisiensi dalam konsumsi minyak, dan membangun cadangan minyak nasional

(Ziegler, 2006). Adapun beberapa rintangan dapat mempengaruhi inisiatif BRI yakni: Pertama, resiko finansial dapat meningkat apabila sejumlah proyek infrastruktur tidak direncanakan secara menyeluruh mengingat skala pinjaman Tiongkok yang cukup besar ke negara – negara jalur BRI dan Kedua, ke-65 negara kawasan jalur BRI mempunyai sistem ekonomi dan rezim politik yang berbeda.

#### **4.2 MALAYSIA SEBAGAI NEGARA STRATEGIS DALAM JALUR BRI dan DILEMA SELAT MALAKA**

Tiongkok menempatkan Malaysia sebagai salah satu negara strategis dalam jalur BRI. Posisi geografis Malaysia yang berada di Asia Tenggara menjadi faktor dalam penempatan tersebut (Wong, 2017). Pada masa Perang Dingin, Hubungan Tiongkok dan Malaysia sempat diwarnai ketegangan politik atau saling menentang ideologi satu sama lain. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman (1957 – 1970) memandang Tiongkok sebagai musuh besar karena dukungan Tiongkok terhadap Partai Komunis Malaysia. Perdana Menteri Najib Razak Husein (1970 – 1976) mencoba untuk mengurangi sentimen negatif tersebut dengan menjalin pendekatan dengan Tiongkok dan hal ini membuat Malaysia sebagai negara pertama ASEAN yang membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok tahun 1974. Namun, hal ini belum cukup efektif untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan pemimpin Malaysia dengan Tiongkok.

Situasi berubah ketika Deng Xiaoping mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok dan Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia (1981 – 2003). Kebijakan Mahathir dalam ekonomi adalah untuk mendiversifikasi pasar luar negeri Malaysia setelah resesi ekonomi dunia tahun 1980-an dan memanfaatkan potensi ekonomi yang luas dari pasar Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan Malaysia pada ekonomi Barat. Pembubaran Partai Komunis Malaysia serta berakhirnya Perang Dingin tahun 1989 menghilangkan hambatan politik dalam hubungan Tiongkok-Malaysia yang kemudian membuka jalan baru pada hubungan bilateral (Cheng-Chwee, 2012).

Pada tahun 2002 dan 2003, Malaysia menyusul Singapura untuk pertama kalinya sebagai mitra dagang terbesar Tiongkok dalam kawasan ASEAN. Mahathir juga menganut kebijakan yang dinamakan *Bandwagoning*. *Bandwagoning* adalah kebijakan dimana suatu negara memilih untuk bersekutu dengan negara besar (*the rising power*) terutama Tiongkok (Cheng-Chwee, 2012). Relasi Malaysia dengan Tiongkok dilanjutkan oleh Najib Tun Razak yang menjabat sebagai Perdana Menteri keenam pada bulan April 2009 ketika Razak memilih Tiongkok sebagai negara pertama di luar ASEAN untuk dikunjungi.

Malaysia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam koridor ekonomi *China-Indochina*. Tiongkok menginvestasikan sejumlah proyek infrastruktur di Malaysia yang telah disepakati dalam MOU Tiongkok dan Malaysia (Loh, 2018). Proyek infrastruktur yang diinvestasikan berupa jalur kereta api dan pelabuhan maritim yaitu: *East Coast Rail Link* (ECRL) adalah jalur rel yang diinvestasikan senilai US\$ 13 miliar yang menghubungkan pelabuhan Klang di pesisir Barat Semenanjung Malaysia hingga ke pelabuhan Kuantan di pesisir Timur Semenanjung Malaysia. Sementara pelabuhan - pelabuhan maritim yang diinvestasikan Tiongkok diantaranya: Pelabuhan Gerbang Malaka senilai US\$ 1.96 miliar, Pelabuhan Kuala Linggi senilai US\$ 2.8 miliar dan proyek Pelabuhan Penang senilai US\$ 1.4 miliar.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyambut dengan antusias terhadap proyek – proyek infrastruktur yang diinvestasikan oleh Tiongkok. Memenuhi kebutuhan infrastruktur berarti dapat mempercepat pembangunan dengan membantu Malaysia mengeksport produk mereka ke pasar luar negeri (Loh, 2018). Tiongkok dan Malaysia memusatkan komoditas ekspor impor pada bahan baku minyak dan kimia, mesin – mesin industri, bahan baku logam dan besi, produk agrikultur, produk elektronik, dan minyak kelapa sawit.

Awal perkembangan sikap Malaysia dengan Tiongkok terhadap isu Laut Tiongkok

Selatan berlandaskan pada deklarasi politik yang dinamakan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Seas* (DOC). DOC merupakan suatu deklarasi politik yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan di wilayah maritim yang disengketakan. Namun, Tiongkok melakukan suatu langkah provokatif dengan meningkatkan kehadirannya di kepulauan Paracel hingga *James Shoal* yang berjarak 80 km dari pesisir Malaysia tahun 2014. Sebagai *Claimant State*, Malaysia mengadopsi pendekatan *Playing It Safe* untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok (Parameswaran, 2015). Najib Razak tidak mengambil kebijakan radikal untuk berkonflik dengan Tiongkok terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan karena investasi Tiongkok mempunyai peranan penting untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang melambat akibat penurunan harga minyak global serta Nilai mata uang Ringgit mengalami penurunan terhadap US dollar dalam tiga tahun terakhir.

Tiongkok sendiri tidak terlalu mempedulikan masalah pemerintahan Najib Razak karena adanya persaingan yang berlangsung dengan Amerika Serikat untuk pengaruh di kawasan Asia Tenggara atau Pasifik. Tiongkok memandang upaya Amerika mendirikan perjanjian TPP (*Trans-Pacific Partnership*) adalah untuk menghambat pengaruh Tiongkok serta meyakinkan

Malaysia untuk menentang Tiongkok terhadap isu Laut Tiongkok Selatan (Chin, 2016).

Pada tahun 2003, Tiongkok memiliki ketergantungan yang berlebih pada Selat Malaka perihal sumber energinya sehingga Presiden Hu Jintao menggambarkan hal ini sebagai *The Malacca Dilemma*. Hu Jintao memaparkan dua alasan untuk waspada mengenai keadaan Selat Malaka; Pertama timbulnya ketakutan pada aktor non-negara seperti pembajakan atau terorisme yang dapat mengganggu perdagangan maritim Tiongkok, Kedua adalah ketakutan pada negara lain atau kekuatan tertentu yang berupaya untuk mendapatkan kendali lebih besar atas Selat Malaka (Decker, 2017). Hal ini berubah seiring dengan *Maritime Silk Road* yang diperkenalkan Presiden Xi Jinping pada tahun 2013.

Asia Tenggara adalah jalur utama dalam *Maritime Silk Road* karena ASEAN merupakan mitra strategis bagi Tiongkok dan setengah jalur perdagangan dengan negara – negara inisiatif BRI berada di ASEAN. Oleh karena itu, Tiongkok menginvestasikan beberapa pelabuhan di Malaysia termasuk *Melaka Gateway* dan *East Coast Rail Link* (ECRL) yang mampu memberikan sebuah resolusi pada ketergantungan Tiongkok terhadap Selat Malaka. ECRL juga memainkan peran penting karena posisi geopolitiknya yang menghubungkan pelabuhan Klang di pesisir barat hingga pelabuhan Kuantan di pesisir

timur Semenanjung Malaysia dan pada akhirnya menuju Laut Tiongkok Selatan (Lim, 2018).

#### **4.3 KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK TERKAIT BRI di MALAYSIA**

Dalam pembahasan ini akan menggambarkan analisis kepentingan nasional terkait BRI di Malaysia. *Economic Interest* (kepentingan ekonomi) adalah bagian dari empat klasifikasi kepentingan nasional yang menjadi acuan terhadap kepentingan Tiongkok mereformasi ekonominya melalui inisiatif BRI. Hal ini terlihat dari Inisiatif BRI yang memprioritaskan konektivitas melalui investasi proyek infrastruktur, komoditas ekspor impor, kerja sama ekonomi dengan 65 negara yang tergabung dalam BRI serta mampu mengintegrasikan ekonomi Tiongkok dalam pembangunan di Asia, Afrika, Eropa dan sekitarnya.

Upaya Tiongkok meningkatkan ekonomi nasionalnya dapat dijelaskan melalui lima poin utama yaitu Pertama; Tiongkok mengadakan komoditas ekspor impor dengan Malaysia. Kedua negara memfokuskan ekspor impor pada distribusi petroleum, minyak kelapa sawit, logam besi dan baja, karet, dan peralatan mesin. Kedua, melakukan investasi luar negeri (*foreign investment*) di beberapa negara. Tiongkok menginvestasikan sejumlah proyek pelabuhan, jalur rel di Malaysia sebagai bagian dari inisiatif BRI. Ketiga, pencarian

sumber minyak atau sumber mineral lainnya. Pencarian sumber minyak dilakukan dengan cara memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur impor minyak yang mengalir ke Tiongkok. Keempat, upaya mempromosikan kerja sama regional Tiongkok dengan Malaysia. Kelima, penyerapan modal asing (*foreign capital*). Investasi luar negeri (*foreign investment*) adalah bagian dari upaya Tiongkok menyerap modal asing di Malaysia.

*World Order interest* adalah kepentingan yang dibentuk berdasarkan norma dan aturan demi menguntungkan suatu kekuatan dominan. Inisiatif BRI adalah perwujudan ambisi Tiongkok untuk memperbaharui tatanan geopolitik global abad ke-21 serta untuk menjadi kekuatan dominan di Asia. Hal ini terlihat pada pembagian inisiatif BRI yang menjadi dua jalur yakni: jalur darat (*Silk Road Economic Belt*) dan jalur maritim (*21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*).

Strategi besar (*Grand Strategy*) adalah serangkaian upaya atau susunan ide Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di lingkungan internasional, rebalancing dengan kekuatan lain seperti Amerika Serikat serta menjadi kekuatan dominan di Asia. Strategi besar juga diterapkan sebagai kepentingan jangka panjang Tiongkok. Hal ini mengarah pada evolusi kebijakan Tiongkok dari *Open-door Policy* hingga inisiatif BRI selama beberapa dekade.

Strategi besar Tiongkok juga dapat dihubungkan dengan peran Selat Malaka sebagai *Strategic Chokepoint*. Tiongkok sangat membutuhkan Selat Malaka untuk mengatasi ketergantungannya pada sumber energi. Pada tahun 2014, Tiongkok mengonsumsi minyak sebanyak 11 juta barel dan menjadikan Tiongkok sebagai negara importir minyak terbesar. Impor minyak naik dua kali lipat dari 30% tahun 2000 menjadi 57% tahun 2014 sehingga menimbulkan rintangan bagi Tiongkok dalam aspek keamanan minyak. Oleh karena itu, inisiatif BRI memberi peluang untuk mendiversifikasikan jalur pengangkutan minyak melalui beberapa koridor seperti Koridor Tiongkok-Pakistan (CPEC), pipa minyak Myanmar-Tiongkok, dan rute Selat Malaka (Sarker, 2018). Hal ini merupakan strategi utama Tiongkok untuk mengurangi resiko atau rintangan terhadap keamanan dalam aliran pengangkutan sumber energi

Posisi Selat Malaka yang terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia mempunyai peran untuk menghubungkan negara – negara ekonomi terkuat di Asia seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. Namun banyaknya negara yang memiliki kepentingan di Selat Malaka akan memicu persaingan satu sama lain untuk meraih supremasi dalam posisi geopolitik. Oleh karena itu melalui strategi besarnya, Tiongkok mengamankan kepentingan

energinya dengan membangun beberapa pelabuhan dan jalur rel diantaranya *Melaka Gateway* dan ECRL yang berada dibawah naungan BRI.

Secara ekonomi, Tiongkok menjanjikan pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang berimbas positif pada ekonomi Malaysia. Perdana Menteri Najib Razak menyambut baik upaya Tiongkok tersebut karena berpotensi menyelamatkan ekonomi Malaysia yang melamban akibat menurunnya harga minyak global. Secara politik, Tiongkok dapat mengubah sikap Malaysia terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan dan membujuk Malaysia untuk lebih mendukung inisiatif BRI ketimbang TPP yang diinisiatifkan oleh Amerika Serikat.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah Keberadaan inisiatif BRI akan menimbulkan dampak terhadap Tiongkok baik dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Sebuah representasi dari kepentingan nasional Tiongkok yang selain mengedepankan konektivitas antar negara, juga mengedepankan upaya untuk meningkatkan ekonomi nasionalnya. Setelah melakukan reformasi secara masif pasca Perang Dingin, Tiongkok menyimpulkan bahwa prioritas ekonomi berada diatas kepentingan lainnya. Hal ini membuahkan hasil pada GDP Tiongkok

yang menempati posisi terbesar kedua di dunia. Bila dikaitkan dengan kepentingan nasional dari segi ekonomi, maka Inisiatif BRI digambarkan sebagai upaya Tiongkok memproyeksikan kekuatan ekonominya dengan cara membangun proyek – proyek infrastruktur di Malaysia yang merupakan salah satu negara jalur BRI serta memfasilitasi pendanaan proyek infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan komoditas ekspor impor bagi Tiongkok.

Kepentingan nasional lainnya adalah Tiongkok mampu meningkatkan relasi dengan negara – negara yang berada dalam jalur BRI. Hal ini terlihat dari proyek infrastruktur yang didirikan di Malaysia mampu memengaruhi kebijakan Malaysia terhadap permasalahan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Meski Tiongkok mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bentuk pemenuhan janji Tiongkok untuk meningkatkan hubungan dengan Malaysia yang telah dijalaninya sejak 1974, adanya agenda Tiongkok untuk mempertahankan kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan seperti mempertahankan sembilan garis batas teritorialnya (*nine-dash line*), mempertahankan kepulauan Spratly dan Paracel. Adapun Tiongkok mempunyai kepentingan terhadap sumber keamanan energi melalui inisiatif BRI yang membawa hal ini pada strategi Tiongkok.

Ketergantungan Tiongkok pada sumber minyak memfokuskan beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selat Malaka adalah selat yang dipandang strategis karena sebagian besar impor minyak yang akan menuju Laut Tiongkok Selatan melewati selat ini dan pada akhirnya menuju Tiongkok. Posisi geografis Malaysia yang berdekatan dengan Selat Malaka juga menjadi penentu dalam kepentingan strategis Tiongkok. Strategi besar Tiongkok (*grand strategy*) adalah untuk menjadi kekuatan dominan di Asia. Kekuatan dominan mampu diraih dengan *hard power* atau *soft power* seperti Tiongkok yang menggencarkan kebangkitan damai (*peaceful rise*). Agar mampu menjadi kekuatan dominan, maka Tiongkok perlu memanfaatkan inisiatif BRI sebagai strategi untuk menguatkan dominasinya di Laut Tiongkok Selatan, mengamankan jalur impor minyak Tiongkok di Selat Malaka, serta menginvestasikan sejumlah proyek infrastruktur di Malaysia untuk membuat Malaysia semakin condong ke Tiongkok dalam sisi hubungan diplomatik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Blackwill, Robert D. & Campbell Kurt M. (2016). Xi Jinping on the Global Stage. Council Special Report No. 74, International Institutions and Global Governance Program. Diakses pada 23 Januari 2019
- CHA, Changhoon. (2017). China's Westward March: Strategic Views of One Belt, One Road. *The Korean Journal of International Studies* Vol.15, No.3
- (December 2017), 483-500. Diakses pada 18 September 2018 melalui : <http://dx.doi.org/10.14731/kjis.2017.12.15.3.483>
- Chan, Sarah (2017) The Belt and Road Initiative: Implications for China and East Asian Economies. *The Copenhagen Journal of Asian Studies* 35(2), diakses pada 21 Januari 2019
- Cheng-Chwee, KUIK. (2012). Malaysia's China Policy in the Post-Mahathir Era: A Neoclassical Realist Explanation, No. 244. RSIS Working Paper. Diakses pada 14 Januari 2018 melalui: <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP244.pdf>
- Cheang, Vannarith. (2017). Cambodia Embraces China's Belt and Road Initiative ISSN 2335-6677, No. 48. ISEAS YUSOF ISHAK INSTITUTE. Diakses pada 26 Januari 2018 melalui: [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/SEAS\\_Perspective\\_2016\\_48.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/SEAS_Perspective_2016_48.pdf)
- De Decker, Victor. (2017). THE GEOECONOMICS BEHIND THE BELT AND ROAD INITIATIVE HOW THE BRI IS SHAPING A NEW GEOECONOMIC ORDER. Stamnummer: 01405854. Diakses pada 30 Januari 2019 melalui: [https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/509/652/RUG01-002509652\\_2018\\_0001\\_AC.pdf](https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/509/652/RUG01-002509652_2018_0001_AC.pdf)
- Doga, Alexander. (2016). China's Contemporary Grand Strategy (and the AIIB). Diakses pada 21 Desember 2018 melalui : <http://idos.gr/wp-content/uploads/2016/04/DOGA-CONTEMPORARY-GRAND-STRATEGY-OF-CHINA.pdf>
- Echeverri-Gent, John & Herlevi, April. (2015). **Economic Interdependence and Strategic Interest: China, India, and the United States in the New**

- Global Order.** Diakses pada 12 September 2018 melalui:  
<http://politics.virginia.edu/johnecheverrigent/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/Economic-Interdependence-and-Strategic-Interest-China-India-and-the-United-States-in-the-New-Global-Order.pdf>
- Ferdinand, Peter. (2016). Westward ho-the China dream and 'one belt, one road': Chinese foreign policy under Xi Jinping. *International Affairs*. Diakses pada 23 Februari 2019 melalui:  
[https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/ia/INTA91\\_4\\_Ferdinand.pdf](https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/ia/INTA91_4_Ferdinand.pdf)
- Gruver, William & T. Zhu, Haokang. (2016). Deng Xiaoping: A Leadership Case Study. *International Journal of Arts & Sciences*. Diakses pada 22 Januari 2019 melalui:  
[https://www.researchgate.net/publication/304996613\\_Deng\\_Xiaoping\\_A\\_Leadership\\_Case\\_Study](https://www.researchgate.net/publication/304996613_Deng_Xiaoping_A_Leadership_Case_Study)
- Han, David., Saravanamuttu, Johan. (2016). Malaysia-China Relations: A New Turn? No. 274. Diakses pada 4 Februari 2018 melalui:  
<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/11/CO16274.pdf>
- Hu, Zulu & S.Khan, Mohsin. (1997). *Why Is China Growing So Fast? Economic Issues No. 8 International Monetary Fund*. Diakses pada 22 Maret 2018 melalui :  
<https://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/ISSUES8/issue8.pdf>
- Huan, Guochang. (1986). CHINA'S OPEN DOOR POLICY, 1978-1984. *Journal of International Affairs* Vol. 39, No. 2, CHINA IN TRANSITION (WINTER 1986), pp. 1-18. Diakses pada 21 Januari 2019 melalui:  
<https://www.jstor.org/stable/24356571>
- Hong, Zhao. (2016). Trends in Southeast Asia CHINA'S ONE BELT ONE ROAD: AN OVERVIEW OF THE DEBATE. ISBN 978-981-47-6236-6. Diakses pada 5 Februari 2018 melalui:  
<https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/ASEAN,%20China%27s%20rise%20and%20geopolitical%20stability%20in%20Asia.pdf>
- Jia, Stanley & Wong, Ai Ai. (2017). Belt & Road: Opportunity & Risk The Prospects and perils of building China's New Silk Road. Silk Road Associates. Diakses pada 19 Desember 2018 melalui :  
[https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017/10/belt-road/baker\\_mckenzie\\_belt\\_road\\_report\\_2017.pdf](https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017/10/belt-road/baker_mckenzie_belt_road_report_2017.pdf)
- Kai-sing Kung, James & Lin, Justin. (2003). The Causes of China's Great Leap Famine, 1959-1961. *Economic Development and Cultural Change*. Diakses pada 19 Januari 2019 melalui :  
[https://www.researchgate.net/publication/24098166\\_The\\_Causes\\_of\\_China's\\_Great\\_Leap\\_Famine\\_1959-1961](https://www.researchgate.net/publication/24098166_The_Causes_of_China's_Great_Leap_Famine_1959-1961)
- Lahiri, Imankalyan. (2009). Malaysia's Foreign Policy Under Mahathir Mohammad. *Academic Excellence*. Diakses pada 26 Januari 2019 melalui:  
[http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/163626/8/08\\_chapter%204.pdf](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/163626/8/08_chapter%204.pdf)
- Lean, Hooi Hooi & Smyth, Russell. (2016). The Malaysia-China Economic Relationship at 40: Broadening Ties and Meeting the Challenges for Future Success. 39-52. 10.1007/978-3-319-24232-3\_3. Diakses pada 5 September 2018 melalui :  
[https://www.researchgate.net/publication/286930606\\_The\\_Malaysia-China\\_Economic\\_Relationship\\_at\\_40](https://www.researchgate.net/publication/286930606_The_Malaysia-China_Economic_Relationship_at_40)

- Broadening Ties and Meeting the Challenges for Future Success
- Liu, Qianqian. (2010). China's Rise and Regional Strategy: Power, Interdependence and Identity. *Journal of Cambridge Studies*, 5 (4), 76. Diakses pada 29 Agustus 2018 melalui : <https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/255468/201004-article7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Liow, Joseph Chinyong. (2000). Malaysia's Post-Cold War China Policy: A Reassessment, Chapter 2. Malaysia-China Relations in the 1990s: The Maturing of a Partnership, *Asian Survey*, vol. 40, no. 4. Diakses pada 11 Desember 2018
- London School of Economics and Political Science. (2018). China's Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia. CIMB ASEAN Research Institute. Diakses pada 27 Januari 2019 melalui : <http://www.lse.ac.uk/ideas/research/reports/china-sea-bri>
- Magri, Paolo & Amighini, Alessia. (2016). *China Dream: Still Coming True?*. ISBN 978-88-99647-18-6. Milan: Italian Institute for International Political Studies (ISPI). Diakses pada 25 Februari 2019 melalui: [https://www.ispionline.it/it/EBook/Rapporto\\_Cina\\_2016/Rapporto\\_cina\\_2016.pdf](https://www.ispionline.it/it/EBook/Rapporto_Cina_2016/Rapporto_cina_2016.pdf)
- Mirza, Zahid Latif. (2016). CHINESE VISION OF ONE BELT ONE ROAD AND STRATEGIC DIMENSIONS OF CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR. Diakses pada 22 Agustus melalui : [http://www.ndu.edu.pk/issra/issra\\_publications/margalla-paper/Margalla-Papers-2016/1\\_Zahid\\_Latif\\_Mirza.pdf](http://www.ndu.edu.pk/issra/issra_publications/margalla-paper/Margalla-Papers-2016/1_Zahid_Latif_Mirza.pdf)
- Muni, S.D. (2011). *India's 'Look East' Policy: The Strategic Dimension*. ISAS Working Paper No. 121, National University of Singapore. Diakses pada 30 Juli 2018 melalui: [https://www.files.ethz.ch/isn/126612/ISAS\\_Working\\_Paper\\_121-Email-India%27s\\_%27look-east%27\\_policy\\_the\\_strategic\\_dimension\\_01022011145800.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/126612/ISAS_Working_Paper_121-Email-India%27s_%27look-east%27_policy_the_strategic_dimension_01022011145800.pdf)
- Norton, Simon. (2015). China's Grand Strategy. Diakses pada 14 November 2018 melalui : [https://www.researchgate.net/publication/320014084\\_China's\\_grand\\_strategy](https://www.researchgate.net/publication/320014084_China's_grand_strategy)
- Nuechterlein, D. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266. Diakses pada 18 Agustus 2018 melalui : <http://www.jstor.org/stable/20096778>
- Nufus, Hayati & Kunci, Kata & Tiengkong, Impian & Tiengkong, Kebangkitan & Sutra, Jalur. (2014). *IMPIAN TIONGKOK: NASIONALISME TIONGKOK MELINTAS BATAS DALAM PEMBANGUNAN TIONGKOK*. Diakses pada 23 Januari 2019 melalui: [www.researchgate.net/publication/327829570](http://www.researchgate.net/publication/327829570)
- Park, Donghyun. (2007). The prospects of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A qualitative overview. *Journal of The Asia Pacific Economy - J ASIA PAC ECON*. 12. 485-503. 10.1080/13547860701594103. Diakses pada 28 Desember 2018 melalui : [https://www.researchgate.net/publication/247515171\\_The\\_prospects\\_of\\_the\\_ASEAN-China\\_Free\\_Trade\\_Area\\_ACFTA\\_A\\_qualitative\\_overview](https://www.researchgate.net/publication/247515171_The_prospects_of_the_ASEAN-China_Free_Trade_Area_ACFTA_A_qualitative_overview)

- Prameswaran, Prasanth. (2015). Playing It Safe: Malaysia's Approach to the South China Sea and Implications for the United States. Diakses pada 18 Desember 2018 melalui : [https://www.files.ethz.ch/isn/189746/CNAS%20Maritime%206\\_Paramaswaran\\_Final.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/189746/CNAS%20Maritime%206_Paramaswaran_Final.pdf)
- S. Glaser, Bonnie (2014). China's Grand Strategy in Asia. Statement before the U.S.-China Economic and Security Review Commission, CSIS. Diakses pada 26 November 2018 melalui : [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/attachments/t\\_s140313\\_glaser.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/t_s140313_glaser.pdf)
- Saich, Tony. (2017). What Does General Secretary Xi Jinping Dream About?. Diakses pada 13 September 2018 melalui : [https://ash.harvard.edu/files/ash/files/what\\_does\\_xi\\_jinping\\_dream\\_about.pdf](https://ash.harvard.edu/files/ash/files/what_does_xi_jinping_dream_about.pdf)
- Sarker, M. , Hossin, M. , Hua, Y. , Sarkar, M. and Kumar, N. (2018) Oil, Gas and Energy Business under One Belt One Road Strategic Context. *Open Journal of Social Sciences*, 6, 119-134. Diakses pada 5 Maret 2019 melalui: [https://file.scirp.org/pdf/JSS\\_2018042015142343.pdf](https://file.scirp.org/pdf/JSS_2018042015142343.pdf)
- Wang, Dr. Yuan-Kang. (2006). China's Grand Strategy and U.S. Primacy: Is China Balancing American Power?. THE BROOKINGS INSTITUTION CENTER FOR NORTHEAST ASIAN POLICY STUDIES. Diakses pada 27 November 2018 melalui : <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/wang2006.pdf>
- Weiss, A. David. (2017). Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Congressional Research Service, 7-5700 R44754. Diakses pada 21 Januari 2018 melalui : <https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf>
- Xuetong, Yan. (2002). ANALYSIS OF CHINA'S NATIONAL INTERESTS. ISBN-10: 7201024930, EAPASI E-book. Diakses pada 10 September 2018 melalui : <https://www.eapasi.com/an-analysis-of-chinas-national-interests.html>
- Zhong, Yu. (2016). The Importance of the Malacca Dilemma in the Belt and Road Initiative. *Journal of Policy Science*, 2016. ISSN 1881-6703. vol. 10., pp.85-109. Diakses pada 31 Januari 2019 melalui: <https://core.ac.uk/download/pdf/60551684.pdf>
- Ziegler, Charles. (2006). The Energy Factor in China's Foreign Policy. *Journal of Chinese Political Science*. Diakses pada 8 Februari 2019 melalui: [https://www.researchgate.net/publication/225561248\\_The\\_Energy\\_Factor\\_in\\_China's\\_Foreign\\_Policy](https://www.researchgate.net/publication/225561248_The_Energy_Factor_in_China's_Foreign_Policy)